

## PENGARUH PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Monica Feronica Bormasa**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki, Maluku, Indonesia  
monicaferonicabormasa@gmail.com

Received : 01-03-2021  
Revised : 08-03-2021  
Accepted : 22-03-2021

### **Abstract**

*This study aims to determine the effect of the role of the village government on the empowerment of village communities in Romean Village, Yaru District, West Southeast Maluku Regency. To answer this main problem, a hypothesis was made as a temporary answer to starting from this research, namely that it is suspected that there is an influence of the Role of the Village Government on the Empowerment of Village Communities. With a population of the study sample of 56 people. The data were analyzed using a simple linear regression formula. The simple linear regression analysis results obtained by the equation  $y = 9.99 + 0.41x$ , while the results of the correlation analysis show that the relationship between the variable of the role of the village government and the empowerment of the village community is 0.48 which is in the interval value 0.42 - 0.599 with the relationship category. strong enough. and the amount of contribution of variable X to Y obtained by the coefficient of determination equation, which is 23.04%. This shows that the Village Government Role variable contributes 23.04% to the Village Community Empowerment variable while the remaining 76.96% is determined by other factors. The significance test using the t test with the degree of sensitivity of 5%, the two-party test with  $dk = 56 - 2 = 54$ , the t value is greater than the t table value ( $3,625 > 2,005$ ), then  $H_a$  is accepted and  $H_0$  is rejected, meaning that there is a positive influence and the significance of the Role of the Village Government in the Empowerment of Village Communities in Serili Village, Masela Island District, Southwest Maluku Regency.*

**Keywords:** *role of village government; and community empowerment.*

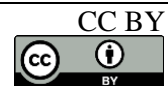
### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Peran Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Untuk menjawab permasalahan pokok tersebut dibuat suatu hipotesis sebagai jawaban sementara untuk bertolak dari penelitian ini, yakni diduga terdapat

---

pengaruh Peran Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan populasi sampel penelitian sebanyak 56 orang. data dianalisis dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana. Hasil analisa regresi linier sederhana diperoleh persamaan  $y = 9,99 + 0,41x$ , sedangkan dari hasil analisa korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Peran Pemerintah Desa dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 0,48 yang berada pada nilai interval 0,42 – 0,599 dengan kategori hubungan cukup kuat. serta besarnya kontribusi variabel X terhadap Y yang diperoleh dengan persamaan koefisien determinasi, yakni sebesar 23,04 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Peran Pemerintah Desa memberikan kontribusi sebesar 23,04 % terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat Desa sedangkan sisanya 76,96 % ditentukan oleh faktor lain. Uji signifikansi dengan menggunakan uji t hitung derajat kepercayaan 5 %, uji dua pihak dengan  $dk=56-2=54$  diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ( $3,625 > 2,005$ ), maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak artinya ada pengaruh yang positif dan signifikansi Peran Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

**Kata Kunci:** peran pemerintah desa; dan pemberdayaan masyarakat.



## PENDAHULUAN

Desa merupakan sentra kekuatan sosial, ekonomi dan politik perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kegiatan pembangunan di Desa tidak dapat dilepas pisahkan dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat kebijakan desa dalam memberi pelayanan, peran serta masyarakat serta pemberdayaan masyarakat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Desa sebagai unit pemerintahan terendah merupakan sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintah. Kegagalan program di tingkat desa akan membawa dampak bagi kegagalan program pemerintahan di atasnya juga. Pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka kedudukan desa dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting.

Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun. Masyarakat miskin memiliki ciri ketidakberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Secara ekonomi jelas masyarakat miskin berada di batas atau dibawah ambang kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal yang diperlukan sebagai manusia wajar.

Kemiskinan sosial, tampak nyata bahwa masyarakat miskin memiliki banyak keterbatasan di lingkungan sosialnya, baik untuk melakukan sosialisasi, interaksi secara vertikal bahkan untuk menjalin jaringan keluar dari lingkungannya. Secara kultural masyarakat miskin biasanya mendapatkan perlakuan yang tidak setara dan dipandang paling bawah dalam segmentasi atau struktur sosial. Secara politis masyarakat miskin tidak memiliki peluang untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di wilayahnya, bahkan kebijakan yang mengintervensi di banyak segi kehidupan mereka sekalipun.

Undang-Undang Desa memuat berbagai aturan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berkembang dalam kemajemukan. Keberadaan masyarakat desa yang majemuk perlu dilindungi dan diberdayakan sehingga semakin maju, mandiri dan demokratis. Adanya pemberdayaan masyarakat desa maka akan tercipta sebuah dasar yang kuat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa sehingga semua lapisan masyarakat akan merasakan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan yang merata.

Proses pembangunan di desa sesuai Undang-Undang Desa mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Membangun Desa” dan “Desa Membangun” yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Tujuan tersebut terpenuhi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban oleh Pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut Pemerintah Desa dituntut untuk melakukan perubahan untuk memungkinkan tumbuhnya ruang-ruang ekonomi desa dan lapangan pekerjaan sehingga generasi muda desa merasa nyaman (*eduhome*) untuk mendapatkan penghidupan yang layak di Desa (Alaslan, 2021:5)

Pemerintah secara berkelanjutan berupaya untuk memberdayakan masyarakatnya agar meningkatkan pemberdayaannya sehingga masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Pemberdayaan mampu mendorong masyarakat menuju kemandirian untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Seiring dengan itu, hasil dari pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan segala keterbatasannya secara perlahan mampu menghasilkan masyarakat yang mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat (Mubarak 2010).

Program pemberdayaan masyarakat yang oleh Pemerintah Desa masih sangat lambat hal ini diakibatkan karena kurang adanya peran Pemerintah desa terhadap program pemberdayaan masyarakat desa. Permasalahannya adalah banyak bantuan yang diberikan tidak terkelola dengan baik bahkan sebagian masyarakat Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak menerima bantuan.

Permasalahan yang terjadi di Desa yaitu bantuan kepada masyarakat Desa Romean Kecamatan Yaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang berupa tempat penampungan air bersih yaitu pemberian profil agar masyarakat dapat menikmati air

bersih dengan baik karena pada Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak ada air sungai, sumur bor yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari hanya sumur bor yang berupa air asin. Oleh sebab itu masyarakat Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sangat membutuhkan bantuan Pemerintah untuk memberikan tempat-tempat penampungan air hujan, namun pada kenyataannya saat bantuan itu berikan kepada masyarakat tidak semua masyarakat Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat menerima bantuan itu (profil) tempat penampungan air hujan demi kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini diakibatkan karena kurang adanya peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lewat pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat desa seperti kelompok pertanian awalnya berjalan dengan baik namun kurang adanya peran pemerintah desa dalam memberikan pembinaan kepada kelompok pertanian yang diberdayakan tersebut sehingga program pemberdayaan masyarakat desa dalam hal ini kelompok petani tidak berjalan dengan baik.

Masyarakat Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sampai saat ini juga belum menikmati air bersih dengan baik. Hal ini diakibatkan karena kurang adanya peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini pembangunan air bersih. Bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk dikelola oleh desa belum berjalan dengan baik bahkan sampai saat ini pembangunan untuk pembuatan bak-bak penampungan air bersih belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Peran Pemerintah Desa sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat desa tidak menjalankan peran dengan baik sehingga masalah pemberdayaan pada desa romean masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Ada beberapa kajian penelitian – penelitian terdahulu yang juga relevan dengan penelitian ini yaitu

1. Permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat diantaranya Pemberian bantuan yang kurang memadai, pemberdayaan yang pernah dilakukan tidak dirasakan sebagian besar kelompok masyarakat khususnya kelompok nelayan, pemberdayaan belum dilakukan selama masa kepemimpinan kepala desa yang sekarang dan pemberdayaan yang di lakukan kepala desa lama tidak tepat sasaran juga tidak maksimal. (Jurnal Nasional).
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. berdasarkan kenyataan yang ada desa Sumberpasir merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani serta tingkat pendidikan masyarakat yang usia produktif cenderung masih rendah.. (Jurnal Nasional).
3. Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan desa sukamulya kecamatan pakenjeng kabupaten garut berdasarkan fakta sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa adalah bertani dan juga pada tataran masyarakat umumnya memiliki pendidikan di usia produktif cenderung sangat rendah sehingga program pemberdayaan masyarakat desa sangatlah penting menjadi perhatian pemerintah, sehingga mampu menciptaka kemandirian dan memenuhi perekonomian masyarakat.

Dari tiga penelitian terdahulu ini dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan pada Desa Romean Kecamatan yaru, kabupaten Maluku Tenggara Barat ini juga memiliki kasus yang sama dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa, salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat, pada desa romean secara umum masyarakat sebagian besar mata pencaharian adalah petani dan sebagian kecil adalah nelayan, untuk dapat meningkatkan kemandirian masyarakat perlu adanya pemerdayaan dalam bidang

pertanian, dan juga pemberdayaan bagi para nelayan, namun berdasarkan pengamatan dan penelitian ternyata Pemerintah Desa Romean belum bisa melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan baik, karena ada kendala-kendala yang mempengaruhi salah satunya adalah peran pemerintah dalam pengambilan keputusan, peran pemerintah dalam memberdayakan dan memotivasi masyarakat sehingga peneliti merasa perlu mengambil permasalahan ini sebagai sebuah kajian ilmiah yang dapat diteliti kendala apa saja yang menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam Penelitian ini yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis Pengaruh Peran Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Sebagai sumbangsi pikir bagi Pemerintah Desa Romean.
3. Sebagai salah satu karya ilmiah dalam perbandingan terhadap penelitian-penelitian yang akan datang.

## **PENGERTIAN PERAN PEMERINTAH DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

### **1. Peran Pemerintah Desa**

Pengertian umum peran dapat di artikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sesuatu peristiwa atau dalam situasi tertentu. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan, dan jabatan (status). Tindakan kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang dalam kedudukan atau jabatan yang dimiliki (Sedarmayati,2004 :33).

Menurut Soerjono Soekanto, (2017;243) adalah “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (Status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidup.

Hal ini peranan menentukan apa yang diperbuatnya serta kesempatan-kesempatan apa yang diberi oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu :

- 1) Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat ”.

Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkan sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pemerintah Desa menurut Prof. Drs. HAW Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintah Desa diartikan sebagai :

“Penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati” (Widjaja, 2003 : 3).

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perangkat desa sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 25 bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut *staf*. *Staf* professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan; kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

## 2. Pemberdayaan masyarakat Desa

Menurut Sulistiyani (2018 : 77). “Secara etimologi Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan.

Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya ”.

Menurut Ketaren (2012: 178-183) pemberdayaan adalah “sebuah ”proses menjadi”, bukan sebuah ”proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama *Penyadaran*, pada tahap penyadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai ”sesuatu’, prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun ”*demand*”) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah *Pengkapasitasan*, atau memampukan (*enabling*) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah *Pemberian Daya itu sendiri*, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka ”.

Menurut Soetomo (2012 : 25). Masyarakat adalah “sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi”.

Dari kedua fungsi tersebut bila digabungkan dapat dipahami makna pemberdayaan masyarakat. Yaitu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dari yang kurang berdaya untuk lebih berdaya.

Menurut Moh. Ali Aziz (2012 : 136). “Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam

kelompok formal maupun informal untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses “.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian maka yang menjadi metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan metode Survei. Metode Survei adalah metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu fenomena yang terjadi.

Menurut Riduwan (2006: 205) Metode Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi besar maupun kecil tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel.

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan membahas permasalahan ini dilakukan pengumpulan data melalui :

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian.
3. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang menjadi sampel penelitian ini.
4. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan literatur, baik buku-buku dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan penelitian.

### **2. Teknik Analisis Data**

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan analisis statistik untuk mengetahui pengaruh antara kedua Variabel tersebut, maka digunakan analisis Regresi Linier Sederhana dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bx$$

*Di mana*

Y = Pemberdayaan Masyarakat Desa

X = Peran Pemerintah Desa

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

Responden adalah masyarakat Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, akan diminta pendapatnya tentang Pengaruh Peran Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa, sekaligus untuk mengukur setiap jawaban responden maka penulis menetapkan bobot atas setiap jawaban yang diberikan oleh setiap responden.

### **3. Teknik Pengujian Hipotesis**

Untuk menguji keberlakuan hipotesis penelitian, maka digunakan uji (t hitung) ada taraf nyata 5 % (0,05) uji dua pihak dengan  $dk=n-2$  ( $56-2=54$ ).

- a. Hipotesis ( $H_a$  dan  $H_o$  dalam uraian kalimat

Ha : Ada pengaruh Peran Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

H0 : Tidak ada Pengaruh Peran Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Hipotesis (Ha dan H0) model statistik

Ha :  $p \neq 0$

H0 :  $p = 0$

b. Kriteria pengujian dua pihak

Jika :  $t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung}$  maka Ha diterima dan H0 ditolak

$t \text{ tabel} \geq t \text{ hitung}$  maka H0 diterima dan Ha di tolak

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

dimana :

n = Jumlah Sampel

r = Nilai Korelasi

$r^2$  = Nilai Koefisien

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Setelah melewati serangkaian perhitungan maka berdasarkan angka-angka yang dibutuhkan untuk mengetahui variabel bebas terhadap variabel terikat maka perlu dilakukan pengujian dengan rumus regresi linier sederhana. Menurut metode Regresi linier sederhana garis atau fungsi regresi dapat dihitung dengan rumus :

$$Y = a + bx$$

dimana :

y = Pemberdayaan Masyarakat Desa

x = Peran Pemerintah Desa

a = konstanta

b = Koefisien Regresi

Dengan demikian untuk mendapatkan nilai dari masing-masing variabel maka digunakan persamaan sebagai berikut :

se  $b = \frac{n \sum xy - (\sum x) (\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$  ada maka dapat di hitung nilai a dan b

$$a = \frac{(983)(19307) - (1033)(18236)}{18978781 - 18837788}$$

$$a = \frac{140993}{14103}$$

$$b = \frac{56(18236) - (1033)(983)}{56(19307) - (1033)^2}$$

$$b = \frac{(1021216) - (1015439)}{(1081192) - (1067089)}$$



$$b = \frac{5777}{14103}$$

1. a. Mengetahui persamaan fungsi regresi :

$$y = a + bx$$

Berarti

$$y = 9,99 + 0,41x$$

Ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan (kenaikan) pada variabel “X” (Peran Pemerintah Desa) sebesar 1 point akan diimbangi dengan kenaikan variabel “Y” (Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebesar 0,41 pada konstanta 9,99 point. dan sebaliknya setiap kali terjadi (penurunan) Pada Variabel “X” (Peran Pemerintah Desa) sebesar 1 point akan diimbangi dengan penurunan variabel “Y” (Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebesar 0,41 point pada konstanta 9,99 point.

Untuk mengetahui hubungan kedua variabel, maka berdasarkan nilai-nilai dalam tabel penolong regresi tersebut kemudian dihitung dengan menggunakan rumus korelasi adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\left[ \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}} \right]}{\left[ \frac{5777}{\sqrt{233644401}} \right]}$$

) maka hubungan antara variabel Peran asyarakat sebesar 0,48 yang berada pada nilai gancukup kuat.

Sedangkan untuk mengetahui kontribusi variabel X terhadap Variabel Y, digunakan rumus koefesien determinasi yakni :

$$KD = r^2 \times 100 \%$$

$$KD = 0,48^2 \times 100 \%$$

$$KD = 0,2304 \times 100 \%$$

$$KD = 23,04 \%$$

Nilai koefisien dererminasi yang telah diperoleh menunjukkan bahwa variabel Peran Pemerintah Desa memberikan kontribusi sebesar 23,04 % terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat Desa sedangkan sisanya 76,96% ditentukan oleh faktor lain.

Nilai korelasi tersebut kemudian dianalisa ke dalam formula uji t hitung, untuk untuk membuktikan dan menganalisa tingkat signifikansi hipotesa yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dengan uji statistik dua pihak pada tingkat kepercayaan 5 % (0,05) dengan derajat kebebasan (dk) = n-2 (56-2 = 54) dengan kriteria pengujian :

Kritetia pengujian dua pihak

Jika : t tabel ≤ t hitung maka Ha diterima H0 ditolak

t tabel ≥ t hitung maka Ha ditolak dan H0 diterima

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

dimana :

n = Jumlah Sampel

r = Nilai Korelasi

r<sup>2</sup> = Nilai Koefisien

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0,48\sqrt{56-2}}{\sqrt{1-0,2304^2}}$$

$$t = \frac{0,48\sqrt{54}}{\sqrt{1-0,0531}}$$

$$t = \frac{0,48(7,348)}{\sqrt{0,9469}}$$

$$t = \frac{3,52704}{0,973}$$

$$t = 3,625$$

Nilai t hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % (0,05), uji dua pihak dengan dk=n-2 (56-2=54). untuk mengetahui distribusi t tabel dengan dk=54 taraf signifikansi 5 % maka digunakan bantuan Microsoft Excel, dengan cara sebagai berikut : Pada Kolom Sel (Cell) ketik = TINV (0,05,54) dan enter, maka diperoleh nilai t tabel = 2,004879 (dibulatkan 2,005) sehingga diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (3,625>2,005)

Dari hasil uji tersebut menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel pada derajat kepekaan 5% (3,625> 2,005), maka Ho ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan antara Peran Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif yang di dapatkan maka ada temuan yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

1. Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan seharusnya bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri, namun yang terjadi adalah peran pemerintah desa dalam pengambilan kebijakan tidak berjalan dengan baik sehingga mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat desa.
2. Peran pemerintah desa sebagai pelaksana program- program pemberdayaan yang dimana diawali dengan proses musrembang yang di lakukan ditingkat desa dalam menentukan program-program pemberdayaan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran setiap tahunnya, namun pada hasil penelitian menunjukan bahwa Masyarakat desa tidak dilibatkan dalam perancangan atau terlibat dalam musrembang sebagaimana untuk sama-sama membahas program-program yang akan dilaksanakan, sehingga program pemberdayaan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.

3. Pemerintah desa tidak melakukan bebrbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa.
4. Kurangnya kerja sama oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

## KESIMPULAN

Peran Pemerintah Desa terhadap memberdayakan masyarakat adalah dengan melakukan Pembinaan kepada masyarakat, memberikan pelayanan dan mengembangkan masyarakat dari yang kurang berdaya untuk menjadi lebih berdaya, karena pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa yang telah diuraikan maka untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (Peran Pemerintah Desa) terhadap variabel terikat (Pemberdayaan Masyarakat Desa), maka digunakan rumus Regresi Linier Sederhana dan ternyata didapati nilai positif yaitu  $Y = 9,99 + 0,41$ . Dari hasil korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Peran Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 0,48 yang berada pada nilai interval 0,40 - 0,59 dengan kategori hubungan cukup kuat. Sedangkan koefisien determinasi yang telah diperoleh sebesar 23,04 % yang berarti menunjukkan bahwa variabel Peran Pemerintah Desa memberikan kontribusi sebesar 23,04 terhadap variabel pemberdayaan masyarakat, sedangkan sisanya 76,96 % ditentukan oleh faktor lain. Uji signifikansi pada taraf 95 % (0,05) dengan derajat kebebasan (dk) = n-2 (56-2=54) diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3,625 > 2,005). Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengaruh (Peran Pemerintah Desa) terhadap variabel terpengaruh (Pemberdayaan Masyarakat) Di Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara teruji kebenarannya..

## BIBLIOGRAPHY

- Alasan, Amtai. 2012. *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. Banyumas: CV. Pena Persada
- Ambar Teguh, Sulistiyani. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta Penerbit Gava media 2018
- Arikunto, 2008, *Prosedur penelitian*, penerbit Jakarta ; Bina Aksara 1983
- HAW. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* . Ed.1-5.Jakarta : Rajawali Pers 2010
- Ketaren. 2012. *Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan Edisi I*. Jakarta: UI Press.
- MA Aziz. 2012 *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta Prenadamedia grup.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007, *Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis masyarakat*, Jakarta 24 September 2007

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014, *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*

Sendarmayati, 2004, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*, Penerbit : Mandar maju 2004

Soerjono Seokanto, 2017 *Kebudayaan*, Jakarta rajawali Pers, 2017

Seotomo 2012, *Pebangunan Masyarakat*, Penerbit: Yokyakarta Pustaka Pelajar 2012

Surjadi. A. 1983, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung Syafie Kencana Inu 2003

Suhendra 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat* , Penerbit Alfabet : 2006

Sulistiyanti 2004, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* Yogyakarta : Graha 2004  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

**Sumber lain :**

Abdulhadimulyaramadhan.blogspot.com/2013/12/terminologi-pemberdayaan-menurut-para-ahli.html

<http://uas201142045grace.wordpress.com/tag/jenis-jenis-penelitian-menurut-para-ahli/>

<http://www.sarjanku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html?m=1>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-teknik-purposive-sampling-menurut-para-ahli/>

Lussychandra.blogspot.com/2013/02/proposal-peranan-kepala-desa-dalam.html

<https://media.neliti.com/media/publications/74778-ID-peran-pemerintah-desa-dalam-memberdayaka.pdf> Jurnal Nasional

[file:///C:/Users/Variel\\_Vanno/Downloads/771-Article%20Text-1159-1-10-20190319.pdf](file:///C:/Users/Variel_Vanno/Downloads/771-Article%20Text-1159-1-10-20190319.pdf)

Jurnal Nasional

<http://eprints.ipdn.ac.id/5629/1/Peran%20Pemerintah%20Artikel.pdf> Jurnal Nasional

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=190336&val=6469&title=Peran%20Pemerintah%20Desa%20Dalam%20Memberdayakan%20Masyarakat%20Desa%20Studi%20Pada%20Desa%20Sumberpasir%20Kecamatan%20Pakis%20Kabupaten%20Malang>